| **Draft Peraturan** | | **Instansi/**  **Satuan Kerja** | **Tanggapan** | **Usulan Perubahan** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Batang Tubuh** | **Penjelasan** |
| RANCANGAN  PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  NOMOR ... TAHUN …  TENTANG  PENETAPAN STATUS DAN TINDAK LANJUT PENGAWASAN PERASURANSIAN, PENJAMINAN, DAN DANA PENSIUN  DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, | PENJELASAN  ATAS  PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  NOMOR ... TAHUN …  TENTANG  PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 2/POJK.05/2017 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA LEMBAGA PENJAMIN |  |  |  |
| Menimbang: | 1. UMUM |  |  |  |
| 1. bahwa sebagai bagian dari pengawasan berbasis risiko, permasalahan yang timbul di sektor perasuransian, penjaminan dan dana pensiun perlu diatasi secara dini, dengan meningkatkan langkah pengawasan sejak dalam pengawasan normal yang kemudian berpotensi memburuk kesehatannya; | PPDP yang sehat merupakan salah satu persyaratan untuk mendukung terciptanya stabilitas sistem keuangan, pertumbuhan perekonomian nasional serta terpeliharanya kepercayaan masyarakat terhadap industri. Oleh karena itu setiap permasalahan PPDP perlu mendapat tindakan yang tepat dan diselesaikan dengan cepat agar tidak mengganggu stabilitas sistem keuangan dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat.  Dalam upaya penyehatan suatu PPDP, permasalahan yang timbul di PPDP perlu di identifikasi dengan cepat dan dirumuskan secara tepat. Permasalahan yang ditemukan harus segera ditangani dan apabila permasalahan terus membesar maka diperlukan peningkatan tindakan pengawasan agar mampu memberikan solusi penyelesaian atas permasalahan yang terjadi. Tindakan pengawasan yang cepat bertujuan untuk mempertahankan kelangsungan usaha dari PPDP agar terus dapat menunaikan kewajibannya kepada konsumen.  Dalam hal dinilai bahwa PPDP tidak dapat lagi mempertahankan kesehatannya, Otoritas Jasa Keuangan harus dapat segera memutuskan untuk mencabut izin usahanya (exit policy). Langkah pencabutan izin usaha dilakukan dengan segera setelah PPDP diyakini tidak mampu menjaga tingkat kesehatannya agar meminimalisir kerugian terhadap konsumen.  Pengaturan terhadap aspek exit policy bagi PPDP diharapkan dapat memberikan panduan yang lebih komprehensif dan rinci mengenai status pengawasan, serta tindakan pengawasan baik bagi Otoritas Jasa Keuangan maupun PPDP sehingga hak peserta, nasabah dan/atau pemegang polis dapat dipenuhi dengan segera, serta meminimalisir adanya permasalahan terkait hak peserta akibat perangkat hukum yang kurang lengkap atau karena berlarut-larutnya kondisi kesehatan PPDP. Mekanisme exit policy bagi PPDP yang efektif dan efisien pada akhirnya akan meningkatkan perlindungan konsumen PPDP dan meningkatkan kepercayaan konsumen kepada PPDP. |  |  |  |
| 1. bahwa untuk melakukan penguatan industri penjaminan dan mewujudkan industri penjaminan yang sehat, terpercaya, dan berkelanjutan, perlu penerapan pengawasan berbasis risiko bagi lembaga penjamin; |  |  |  |  |
| 1. bahwa pengaturan penetapan status pengawasan, dan tindak lanjut pengawasan di sektor perasuransian dan dana pensiun yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.05/2021 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank, perlu disesuaikan dengan perkembangan industri perasuransian, penjaminan dan dana pensiun; |  |  |  |  |
| 1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun; |  |  |  |  |
| Mengingat: | 1. PASAL DEMI PASAL |  |  |  |
| 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845); |  |  |  |  |
| 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845); |  |  |  |  |
| 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5835) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845); |  |  |  |  |
| 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845); |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| MEMUTUSKAN: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENETAPAN STATUS DAN TINDAK LANJUT PENGAWASAN PERASURANSIAN, PENJAMINAN, DAN DANA PENSIUN. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| BAB I |  |  |  |  |
| KETENTUAN UMUM |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Pasal 1 | Cukup jelas. |  |  |  |
| Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan: |  |  |  |  |
| 1. Perusahaan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun yang selanjutnya disingkat PPDP adalah lembaga jasa keuangan yang meliputi perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, perusahaan reasuransi syariah, perusahaan penjaminan, perusahaan penjaminan syariah, perusahaan penjaminan ulang, perusahaan penjaminan ulang syariah, dan dana pensiun. |  |  |  |  |
| 1. Direksi adalah organ PPDP yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan PPDP untuk kepentingan PPDP, sesuai dengan maksud dan tujuan PPDP serta mewakili PPDP, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi PPDP yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas, atau yang setara dengan Direksi bagi PPDP yang berbentuk badan hukum koperasi, usaha bersama, atau dana pensiun. |  |  |  |  |
| 1. Dewan Komisaris adalah organ PPDP yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi bagi PPDP yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas, atau yang setara dengan Dewan Komisaris bagi PPDP berbentuk badan hukum koperasi, usaha bersama, atau dana pensiun. |  |  |  |  |
| 1. Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya disingkat PSP adalah orang perseorangan, badan hukum, dan/atau kelompok usaha yang memiliki saham atau modal perusahaan perasuransian atau lembaga penjamin sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara, atau memiliki saham atau modal perusahaan perasuransian atau lembaga penjamin kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian perusahaan perasuransian atau lembaga penjamin, baik secara langsung maupun tidak langsung. |  |  |  |  |
| 1. Tingkat Kesehatan adalah hasil penilaian kondisi PPDP yang dilakukan terhadap tata kelola perusahaan yang baik, profil risiko, rentabilitas, dan permodalan atau pendanaan. |  |  |  |  |
| 1. Peringkat Komposit adalah peringkat akhir hasil penilaian Tingkat Kesehatan PPDP. |  |  |  |  |
| 1. Pengendali Perusahaan Perasuransian adalah pihak yang secara langsung atau tidak langsung mempunyai kemampuan untuk menentukan Direksi atau Dewan Komisaris, dan/atau memengaruhi tindakan Direksi atau Dewan Komisaris pada perusahaan perasuransian. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| BAB II |  |  |  |  |
| STATUS PENGAWASAN PPDP |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Bagian Kesatu |  |  |  |  |
| Umum |  |  |  |  |
| Pasal 2 |  |  |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan status pengawasan terhadap PPDP. | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Status pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: |  |  |  |  |
| 1. pengawasan normal; | Yang dimaksud dengan “pengawasan normal” adalah pengawasan terhadap PPDP yang dinilai:   * 1. tidak memiliki potensi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha; atau   2. tidak mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha. |  |  |  |
| 1. pengawasan intensif; atau | Yang dimaksud dengan “pengawasan intensif” adalah pengawasan terhadap PPDP yang dinilai memiliki potensi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha. |  |  |  |
| 1. pengawasan khusus. | Yang dimaksud dengan “pengawasan khusus” adalah pengawasan terhadap PPDP yang dinilai mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Bagian Kedua |  |  |  |  |
| Pengawasan Normal |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Pasal 3 | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Dalam hal PPDP dalam pengawasan normal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta PPDP menyampaikan rencana tindak. |  |  |  |  |
| 1. PPDP wajib menyampaikan rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal permintaan Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Bagian Ketiga |  |  |  |  |
| Status Pengawasan Intensif |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Pasal 4 |  |  |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan menetapkan status pengawasan intensif bagi PPDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, jika memenuhi kriteria: | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Tingkat Kesehatan ditetapkan pada Peringkat Komposit 4 (empat); |  |  |  |  |
| 1. Tingkat Kesehatan ditetapkan pada Peringkat Komposit 3 (tiga) dengan peringkat faktor tata kelola perusahaan yang baik pada peringkat 4 (empat) atau peringkat 5 (lima); dan/atau |  |  |  |  |
| 1. memenuhi parameter kuantitatif. |  |  |  |  |
| 1. Pemenuhan parameter kuantitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas: |  |  |  |  |
| 1. bagi perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah, memenuhi parameter kuantitatif: |  |  |  |  |
| 1. tingkat solvabilitas lebih besar atau sama dengan 80% (delapan puluh persen) dan lebih kecil dari 120% (seratus dua puluh persen) dari modal minimum berbasis risiko atau *dana tabarru’* minimum berbasis risiko; | Yang dimaksud dengan “tingkat solvabilitas bagi perusahaan perasuransian” adalah selisih antara jumlah aset yang diperkenankan dikurangi dengan jumlah liabilitas.  Yang dimaksud dengan “modal minimum berbasis risiko” adalah jumlah dana yang dibutuhkan untuk mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan aset dan liabilitas.  Yang dimaksud dengan “dana tabarru’ minimum berbasis risiko” adalah jumlah dana yang dibutuhkan untuk mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan aset dan liabilitas dari dana tabarru’ |  |  |  |
| 1. rasio likuiditas lebih besar atau sama dengan 80% (delapan puluh persen) dan lebih kecil dari 100% (seratus persen); dan/atau | Yang dimaksud dengan “rasio likuiditas” adalah perbandingan jumlah aset lancar dengan jumlah liabilitas lancar. |  |  |  |
| 1. rasio kecukupan investasi lebih besar atau sama dengan 80% (delapan puluh persen) dan lebih kecil dari 100% (seratus persen). | Yang dimaksud dengan “rasio kecukupan investasi” adalah perbandingan jumlah seluruh aset yang diperkenan dalam bentuk investasi dengan aset berupa kas dan bank dibandingkan terhadap jumlah cadangan teknis retensi sendiri ditambah liabilitas pembayaran klaim retensi sendiri dan liabilitas lain kepada pemegang polis atau tertanggung. |  |  |  |
| 1. bagi dana pensiun pemberi kerja yang menjalankan program pensiun manfaat pasti, memenuhi parameter kuantitatif: |  |  |  |  |
| 1. kualitas pendanaan berada pada tingkat 3 (tiga) dengan rasio solvabilitas lebih besar atau sama dengan 50% (lima puluh persen) dan lebih kecil dari 80% (delapan puluh persen); | Yang dimaksud dengan “kualitas pendanaan” adalah keadaan dana dari dana pensiun yang dinilai berdasarkan valuasi aktuaria dengan menentukan liabilitas solvabilitas dan nilai kini aktuarial. |  |  |  |
| 1. rasio likuiditas lebih besar atau sama dengan 80% (delapan puluh persen) dan lebih kecil dari 100% (seratus persen); dan/atau | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. umur piutang iuran lebih dari 3 (tiga) bulan dan kurang dari 24 (dua puluh empat) bulan; | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. bagi dana pensiun pemberi kerja yang menjalankan program pensiun iuran pasti, memenuhi parameter kuantitatif: | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. rasio likuiditas lebih besar atau sama dengan 80% (delapan puluh persen) dan lebih kecil dari 100% (seratus persen); dan/atau |  |  |  |  |
| 1. umur piutang iuran lebih dari 3 (tiga) bulan dan kurang dari 24 (dua puluh empat) bulan; |  |  |  |  |
| 1. bagi dana pensiun lembaga keuangan, memenuhi parameter kuantitatif: |  |  |  |  |
| 1. rasio likuiditas lebih besar atau sama dengan 80% (delapan puluh persen) dan lebih kecil dari 100% (seratus persen); | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. untuk dana pensiun yang telah berdiri lebih dari 3 (tiga) tahun memiliki aset neto lebih kecil dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan/atau | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. rasio penurunan peserta selama 1 (satu) tahun lebih besar dari 50% (lima puluh persen); dan | Yang dimaksud dengan “rasio penurunan peserta” adalah perbandingan jumlah peserta yang keluar terhadap jumlah seluruh peserta. |  |  |  |
| 1. bagi perusahaan penjaminan, perusahaan penjaminan syariah, perusahaan penjaminan ulang, dan perusahaan penjaminan ulang syariah, memenuhi parameter kuantitatif: |  |  |  |  |
| 1. *gearing ratio* lebih besar dari 40 (empat puluh) kali; | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. rasio likuiditas lebih besar atau sama dengan 80% (delapan puluh persen) dan lebih kecil dari 120% (seratus dua puluh persen); dan | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. rasio klaim lebih besar atau sama dengan 90% (sembilan puluh persen). | Perhitungan rasio klaim tanpa memperhitungkan pendapatan subrogasi. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Pasal 5 |  |  |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan menetapkan PPDP dengan status pengawasan intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan. | Perhitungan jangka waktu status pengawasan PPDP paling lama 1 (satu) tahun termasuk jangka waktu penyusunan dan revisi rencana tindak. |  |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan perpanjangan jangka waktu status pengawasan intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila: | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. jangka waktu status pengawasan intensif berakhir; dan |  |  |  |  |
| 1. berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan, PPDP masih memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, |  |  |  |  |
| paling banyak 1 (satu) kali dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. |  |  |  |  |
| 1. Penetapan perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas penilaian Otoritas Jasa Keuangan dengan mempertimbangkan penyelesaian atas rencana tindak yang telah disetujui. | Penilaian Otoritas Jasa Keuangan diberikan berdasarkan keyakinan bahwa dengan adanya perpanjangan waktu maka PPDP dimaksud dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.  Yang dimaksud dengan “penyelesaian atas rencana tindak yang telah disetujui” antara lain proses akuisisi PPDP. |  |  |  |
| 1. Penetapan perpanjangan jangka waktu status Pengawasan intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan peningkatan tindakan pengawasan. | Yang dimaksud dengan “peningkatan tindakan pengawasan” adalah peningkatan jumlah tindakan pengawasan dan/atau penerapan tindakan pengawasan yang berdampak lebih berat bagi PPDP dari tindakan pengawasan yang ditetapkan sebelumnya. |  |  |  |
| 1. Apabila jangka waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan peningkatan status pengawasan. | Cukup jelas. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Pasal 6 |  |  |  |  |
| 1. PPDP yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat tidak ditetapkan pada status pengawasan intensif dalam jangka waktu tertentu oleh Otoritas Jasa Keuangan, jika PPDP: | PPDP yang tidak ditetapkan ke dalam status PPDP dalam status pengawasan intensif merupakan PPDP yang memiliki permasalahan nonstruktural dan diyakini dapat tetap memenuhi kriteria PPDP dalam pengawasan normal |  |  |  |
| 1. dalam proses penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan; dan/atau | Yang dimaksud dengan “dalam proses penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan” adalah PPDP yang telah menyampaikan permohonan persetujuan rencana penggabungan, peleburan, dan/atau pengambilalihan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perizinan usaha dan kelembagaan PPDP. |  |  |  |
| 1. dalam proses penambahan modal disetor yang paling sedikit telah tercatat dalam kriteria dana setoran modal, | Yang dimaksud dengan “kriteria dana setoran modal” adalah pemegang saham PPDP yang telah melakukan setoran modal kepada PPDP melalui *escrow account* yang dapat meningkatkan permodalan PPDP. |  |  |  |
| 1. untuk memenuhi kriteria status pengawasan normal berdasarkan rencana tindak yang telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan. | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan menetapkan PPDP yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan status pengawasan normal. | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Bagi PPDP yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan belum memenuhi kriteria status pengawasan normal serta diketahui bahwa: | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. tidak menindaklanjuti proses penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan; |  |  |  |  |
| 1. tidak menindaklanjuti proses penambahan modal disetor; |  |  |  |  |
| 1. mengalami pemburukan kondisi keuangan; dan/atau |  |  |  |  |
| 1. belum memenuhi kriteria status pengawasan normal, |  |  |  |  |
| Otoritas Jasa Keuangan menetapkan sebagai PPDP dengan status pengawasan intensif. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Pasal 7 | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan perubahan status pengawasan dari status pengawasan intensif menjadi status pengawasan normal jika kondisi PPDP membaik dan tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. |  |  |  |  |
| 1. Penetapan perubahan status pengawasan PPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada Direksi dan Dewan Komisaris PPDP. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Bagian Keempat |  |  |  |  |
| Status Pengawasan Khusus |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Pasal 8 |  |  |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan menetapkan status pengawasan khusus bagi PPDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, jika memenuhi kriteria: | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. jangka waktu status pengawasan intensif telah berakhir; |  |  |  |  |
| 1. Tingkat Kesehatan ditetapkan pada Peringkat Komposit 5 (lima) dengan penilaian faktor tata kelola perusahaan yang baik pada peringkat 5 (lima); dan/atau |  |  |  |  |
| 1. memenuhi parameter kuantitatif. |  |  |  |  |
| 1. Pemenuhan parameter kuantitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas: |  |  |  |  |
| 1. bagi perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah, memenuhi parameter kuantitatif: |  |  |  |  |
| 1. tingkat solvabilitas lebih kecil dari 80% (delapan puluh persen) dari modal minimum berbasis risiko atau dana tabarru’ minimum berbasis risiko; | Lihat penjelasan Pasal 4 ayat (2) Huruf a Angka 1. |  |  |  |
| 1. rasio likuiditas lebih kecil dari 80% (delapan puluh persen); dan/atau | Lihat penjelasan Pasal 4 ayat (2) Huruf a Angka 2. |  |  |  |
| 1. rasio kecukupan investasi lebih kecil dari 80% (delapan puluh persen); | Lihat penjelasan Pasal 4 ayat (2) Huruf a Angka 3. |  |  |  |
| 1. bagi dana pensiun pemberi kerja yang menjalankan program pensiun manfaat pasti, memenuhi parameter kuantitatif: |  |  |  |  |
| 1. kualitas pendanaan berada pada tingkat 3 (tiga) dengan rasio solvabilitas lebih kecil dari 50% (lima puluh persen); | Lihat penjelasan Pasal 4 ayat (2) Huruf b Angka 1. |  |  |  |
| 1. rasio likuiditas lebih kecil dari 80% (delapan puluh persen); dan/atau | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. umur piutang iuran lebih besar atau sama dengan 24 (dua puluh empat) bulan; | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. bagi dana pensiun pemberi kerja yang menjalankan program pensiun iuran pasti, memenuhi parameter kuantitatif: | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. rasio likuiditas lebih kecil dari 80% (delapan puluh persen); dan/atau |  |  |  |  |
| 1. umur piutang iuran lebih besar atau sama dengan 24 (dua puluh empat) bulan; |  |  |  |  |
| 1. bagi dana pensiun lembaga keuangan, memenuhi parameter kuantitatif: |  |  |  |  |
| 1. rasio likuiditas lebih kecil dari 80% (delapan puluh persen); | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. untuk dana pensiun yang telah berdiri lebih dari 3 (tiga) tahun, selama dua tahun berturut-turut memiliki aset neto lebih kecil dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan/atau | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. rasio penurunan peserta selama 2 (dua) tahun berturut-turut lebih besar dari 50% (lima puluh persen); dan | Lihat penjelasan Pasal 4 ayat (2) Huruf d Angka 3. |  |  |  |
| 1. bagi perusahaan penjaminan, perusahaan penjaminan syariah, perusahaan penjaminan ulang, dan perusahaan penjaminan ulang syariah, memenuhi parameter kuantitatif |  |  |  |  |
| 1. *gearing ratio* lebih besar dari 60 (enam puluh) kali; | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. rasio likuiditas lebih kecil dari 80% (delapan puluh persen); dan | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. rasio klaim lebih besar atau sama dengan 100% (seratus persen). | Lihat penjelasan Pasal Pasal 4 ayat (2) Huruf e Angka 3. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Pasal 9 |  |  |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan menetapkan PPDP dengan status pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan. | Perhitungan jangka waktu status pengawasan PPDP paling lama 1 (satu) tahun termasuk jangka waktu penyusunan dan revisi rencana tindak. |  |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan perpanjangan jangka waktu status pengawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila: | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. jangka waktu status pengawasan khusus berakhir; dan |  |  |  |  |
| 1. berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan, PPDP masih memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, |  |  |  |  |
| paling banyak 1 (satu) kali dengan jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan. |  |  |  |  |
| 1. Penetapan perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas penilaian Otoritas Jasa Keuangan dengan mempertimbangkan penyelesaian atas rencana tindak yang telah disetujui. | Lihat penjelasan Pasal 5 ayat (3). |  |  |  |
| 1. Penetapan perpanjangan jangka waktu status pengawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan peningkatan tindakan pengawasan. | Lihat penjelasan Pasal 5 ayat (4). |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Pasal 10 |  |  |  |  |
| 1. PPDP yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat tidak ditetapkan pada status pengawasan khusus dalam jangka waktu tertentu oleh Otoritas Jasa Keuangan, jika PPDP: |  |  |  |  |
| 1. dalam proses penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan; dan/atau | Lihat penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a. |  |  |  |
| 1. dalam proses penambahan modal disetor paling sedikit telah tercatat dalam kriteria dana setoran modal, | Lihat penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b. |  |  |  |
| dalam memenuhi kriteria status pengawasan normal berdasarkan rencana tindak yang telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan menetapkan PPDP yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam status pengawasan normal. | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Bagi PPDP yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan belum memenuhi kriteria status pengawasan normal serta diketahui bahwa: | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. tidak menindaklanjuti proses penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan; |  |  |  |  |
| 1. tidak menindaklanjuti proses penambahan modal disetor; |  |  |  |  |
| 1. mengalami pemburukan kondisi keuangan; dan/atau |  |  |  |  |
| 1. belum memenuhi kriteria status pengawasan normal, |  |  |  |  |
| Otoritas Jasa Keuangan menetapkan sebagai PPDP dalam status pengawasan khusus. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Pasal 11 | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan perubahan status pengawasan dari status pengawasan khusus menjadi status pengawasan normal dan/atau pengawasan intensif jika kondisi PPDP membaik dan tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8. |  |  |  |  |
| 1. Penetapan perubahan status pengawasan PPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada Direksi dan Dewan Komisaris PPDP. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| BAB III |  |  |  |  |
| TINDAK LANJUT STATUS PENGAWASAN |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Pasal 12 | Cukup jelas. |  |  |  |
| Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan surat pemberitahuan penetapan status pengawasan PPDP meliputi: |  |  |  |  |
| 1. pengawasan intensif; atau |  |  |  |  |
| 1. pengawasan khusus, |  |  |  |  |
| kepada Direksi dan Dewan Komisaris dengan disertai alasan penetapan status Pengawasan. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Pasal 13 | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. PPDP dengan status pengawasan intensif atau pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 wajib menyampaikan rencana tindak kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak surat pemberitahuan status pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan |  |  |  |  |
| 1. Rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana perbaikan yang akan dilakukan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi PPDP disertai jangka waktu penyelesaian. |  |  |  |  |
| 1. Rencana perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi: |  |  |  |  |
| 1. memperbaiki rencana bisnis; |  |  |  |  |
| 1. tidak melakukan transaksi tertentu dengan pihak terkait dan/atau pihak tidak terkait; |  |  |  |  |
| 1. tidak melakukan kegiatan tertentu; |  |  |  |  |
| 1. membatasi pelaksanaan rencana penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru; |  |  |  |  |
| 1. tidak melakukan ekspansi jaringan kantor; |  |  |  |  |
| 1. membatasi atau tidak melakukan pertumbuhan aset, penyertaan, dan/atau penyediaan dana baru; |  |  |  |  |
| 1. membatasi penerimaan pinjaman dan/atau penerbitan surat utang; |  |  |  |  |
| 1. menjual sebagian atau seluruh aset dan/atau mengalihkan liabilitas PPDP kepada PPDP lain dan/atau pihak terkait; |  |  |  |  |
| 1. mengalihkan aset dan/atau liabilitas kepada pihak lain; |  |  |  |  |
| 1. membatasi pembayaran remunerasi atau bentuk lain yang dipersamakan, kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota dewan pengawas syariah, atau imbalan kepada pihak terkait; |  |  |  |  |
| 1. mengganti anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; |  |  |  |  |
| 1. menunda atau tidak melakukan distribusi laba; |  |  |  |  |
| 1. memperkuat permodalan melalui setoran modal; |  |  |  |  |
| 1. meminta komitmen pendiri dana pensiun untuk melakukan pembayaran iuran kepada dana pensiun; |  |  |  |  |
| 1. melakukan penggabungan atau peleburan; dan/atau |  |  |  |  |
| 1. tindakan lain. |  |  |  |  |
| 1. Rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. |  |  |  |  |
| 1. Rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu disetujui oleh rapat umum pemegang saham atau rapat umum anggota dalam hal rencana tindak dimaksud memuat rencana penambahan modal disetor atau rencana penggabungan atau peleburan. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Pasal 14 | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) harus memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan permintaan perbaikan, penolakan, atau persetujuan atas rencana tindak yang disampaikan oleh PPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak rencana tindak diterima secara lengkap. |  |  |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan permintaan perbaikan rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal rencana tindak tersebut dinilai dapat menyelesaikan permasalahan yang belum dapat dipenuhi oleh PPDP, namun rencana tindak tersebut masih memerlukan perbaikan. |  |  |  |  |
| 1. Permintaan perbaikan rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada tindakan pengawasan yang didasarkan atas penilaian Otoritas Jasa Keuangan terhadap permasalahan yang dihadapi oleh PPDP. |  |  |  |  |
| 1. PPDP wajib menyampaikan rencana tindak yang telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal surat permintaan perbaikan atas rencana tindak dari Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |  |
| 1. Dalam hal PPDP telah menyampaikan rencana tindak yang telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). |  |  |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan penolakan terhadap rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (6) dalam hal rencana tindak tersebut dinilai tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang menyebabkan PPDP memenuhi kriteria status pengawasan intensif atau pengawasan khusus. |  |  |  |  |
| 1. Dalam hal rencana tindak yang disampaikan ditolak oleh Otoritas Jasa Keuangan, PPDP wajib menyampaikan rencana tindak baru paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan penolakan. |  |  |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atas rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (6) dalam hal rencana tindak tersebut dinilai dapat menyelesaikan permasalahan yang menyebabkan PPDP memenuhi kriteria status pengawasan intensif atau pengawasan khusus. |  |  |  |  |
| 1. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan tidak menyampaikan permintaan perbaikan, penolakan, atau persetujuan, PPDP dapat melaksanakan rencana tindak sesuai dengan yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Pasal 15 | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. PPDP wajib melaksanakan rencana tindak yang telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1). |  |  |  |  |
| 1. PPDP wajib menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan rencana tindak secara bulanan yang disampaikan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. |  |  |  |  |
| 1. Apabila batas akhir penyampaian laporan rencana tindak secara bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan pada hari kerja pertama berikutnya. |  |  |  |  |
| 1. Laporan pelaksanaan rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: |  |  |  |  |
| 1. tindakan perbaikan yang telah dilakukan oleh PPDP; dan |  |  |  |  |
| 1. waktu pelaksanaan perbaikan. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Pasal 16 | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menilai: |  |  |  |  |
| 1. kondisi PPDP semakin memburuk; |  |  |  |  |
| 1. terdapat kegiatan usaha tertentu yang menjadi salah satu penyebab memburuknya kondisi PPDP; dan/atau |  |  |  |  |
| 1. terjadi pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh: |  |  |  |  |
| 1. Direksi; |  |  |  |  |
| 1. Dewan Komisaris; |  |  |  |  |
| 1. dewan pengawas syariah; dan/atau |  |  |  |  |
| 1. PSP, Pengendali Perusahaan Perasuransian, dan/atau pemberi kerja, |  |  |  |  |
| Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan pengawasan berupa pembatasan kegiatan usaha tertentu terhadap PPDP dengan status pengawasan intensif atau pengawasan khusus. |  |  |  |  |
| 1. Pembatasan kegiatan usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada PPDP dan/atau PSP, Pengendali Perusahaan Perasuransian, dan/atau pemberi kerja disertai dengan jangka waktu pembatasan kegiatan usaha tertentu. |  |  |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan pembatasan kegiatan usaha tertentu terhadap PPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada situs web Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Pasal 17 | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. PPDP yang dikenai pembatasan kegiatan usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) wajib: |  |  |  |  |
| 1. menghentikan kegiatan usaha tertentu yang dikenakan pembatasan; dan |  |  |  |  |
| 1. memberitahukan kepada seluruh jaringan kantor mengenai kegiatan usaha tertentu yang dikenakan pembatasan. |  |  |  |  |
| 1. Penghentian kegiatan usaha tertentu dan pemberitahuan kepada seluruh jaringan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan pembatasan kegiatan usaha tertentu dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2). |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Pasal 18 |  |  |  |  |
| 1. PPDP dengan status pengawasan khusus ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan tidak dapat disehatkan, apabila: |  |  |  |  |
| 1. jangka waktu status pengawasan khusus berakhir; dan | Yang dimaksud dengan “jangka waktu status pengawasan khusus berakhir” merupakan jangka waktu pengawasan khusus termasuk perpanjangan jangka waktunya. |  |  |  |
| 1. berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan, PPDP masih memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8. | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Dalam hal PPDP dengan status pengawasan khusus yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan tidak dapat disehatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan menjatuhkan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha PPDP. | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Pencabutan izin usaha PPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada: | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Direksi; |  |  |  |  |
| 1. Dewan Komisaris; dan |  |  |  |  |
| 1. PSP, Pengendali Perusahaan Perasuransian, dan/atau pemberi kerja. |  |  |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan pencabutan izin usaha PPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada situs web Otoritas Jasa Keuangan. | Cukup jelas. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Pasal 19 | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. PPDP yang melanggar ketentuan Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (5), ayat (8), Pasal 15 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 17 dikenai sanksi administratif berupa: |  |  |  |  |
| 1. peringatan tertulis; |  |  |  |  |
| 1. pembatasan kegiatan usaha tertentu; |  |  |  |  |
| 1. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha; |  |  |  |  |
| 1. penurunan hasil penilaian tingkat risiko; |  |  |  |  |
| 1. pembatalan persetujuan; |  |  |  |  |
| 1. pemberhentian dan/atau penggantian Direksi; |  |  |  |  |
| 1. larangan menjadi PSP, Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau dewan pengawas syariah; dan/atau |  |  |  |  |
| 1. denda administratif. |  |  |  |  |
| 1. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf h dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. |  |  |  |  |
| 1. Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dikenakan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). |  |  |  |  |
| 1. Dalam hal PPDP telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif. |  |  |  |  |
| 1. Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan menjatuhkan sanksi administratif berupa peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya. |  |  |  |  |
| 1. Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat: |  |  |  |  |
| 1. menurunkan hasil penilaian Tingkat Kesehatan; |  |  |  |  |
| 1. melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama yang menyebabkan PPDP melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau |  |  |  |  |
| 1. melakukan pencatatan rekam jejak terhadap pihak terkait PPDP yang menyebabkan PPDP melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam sistem elektronik Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| BAB IV |  |  |  |  |
| KETENTUAN LAIN LAIN |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Pasal 20 | Cukup jelas. |  |  |  |
| Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan pertimbangan tertentu dapat memberikan persetujuan atau kebijakan yang berbeda dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| BAB V |  |  |  |  |
| KETENTUAN PERALIHAN |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Pasal 21 | Cukup jelas. |  |  |  |
| Bagi Lembaga Penjamin yang telah memperoleh izin usaha sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan, ketentuan mengenai: |  |  |  |  |
| * 1. kriteria Tingkat Kesehatan dalam penetapan status Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b dan Pasal 8 ayat (1) huruf b; dan |  |  |  |  |
| * 1. kriteria parameter kuantitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e dan Pasal 8 ayat (2) huruf e, |  |  |  |  |
| dinyatakan mulai berlaku 1 (satu) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Pasal 22 | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Penetapan perusahaan perasuransian dan dana pensiun dalam status pengawasan intensif atau pengawasan khusus sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan pemberitahuan terkait penetapan status pengawasan selanjutnya oleh Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |  |
| 1. Rencana tindak yang telah disampaikan oleh perusahaan perasuransian dan dana pensiun dalam status pengawasan intensif dan pengawasan khusus sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan, tetap diproses sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.05/2021 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Pasal 23 | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Setiap sanksi administratif yang telah dikenakan terhadap PPDP berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.05/2021 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. |  |  |  |  |
| 1. PPDP yang belum dapat mengatasi penyebab dikenakannya sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif lanjutan sesuai dengan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| BAB VI |  |  |  |  |
| KETENTUAN PENUTUP |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Pasal 24 | Cukup jelas. |  |  |  |
| Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, ketentuan mengenai penetapan status dan tindak lanjut pengawasan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.05/2021 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6690), dinyatakan tidak berlaku bagi perusahaan perasuransian dan dana pensiun. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Pasal 25 | Cukup jelas. |  |  |  |
| Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.05/2021 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6690), dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Pasal 26 | Cukup jelas. |  |  |  |
| Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Ditetapkan di Jakarta  pada tanggal 2024 |  |  |  |  |
| KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  MAHENDRA SIREGAR |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Diundangkan di Jakarta  pada tanggal |  |  |  |  |
| MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,  YASONNA H. LAOLY |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR |  |  |  |  |